

BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK: PENGGUNAANNYA DALAM DEBAT PUBLIK MENJELANG PILPRES 2019

I Ketut Darma Laksana
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Denpasar

darmalaksana27@yahoo.com

Abstrak

Makalah ini membahas bahasa Indonesia di ruang publik yang berupa debat publik. Pembahasan bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang penggunaannya dalam acara debat umum menjelang Pilpres 2019 yang telah meresahkan masyarakat. Penggunaannya melalui pilihan kata yang mengandung fitnah, hasutan, dan ujaran kebencian dapat mengancam keutuhan bangsa. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang dibahas mencakupi: (1) Apa yang melatarbelakangi penggunaan bahasa yang bermakna negatif itu? (2) Apa dampaknya bagi pengembangan kepribadian bangsa, dan (3) Bagaimanakah caranya menangkal perilaku berbahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu? Ketiga masalah tersebut dibahas dengan menggunakan metode dekonstruksi dan metode etnografi berbahasa. Dengan menerapkan metode dekonstruksi, pembongkaran-sistem, diperoleh hasil bahwa penutur dengan “motivasi” tertentu telah melakukan pembangunan-sistem dengan harapan dapat memainkan “pasar bahasa”, nilai produksi bahasa yang menandai posisi seseorang bahwa dia yang benar dan berusaha memengaruhi khalayak agar percaya pada persepsi yang dibangunnya. Sementara itu, dengan menerapkan metode etnografi berbahasa, tanggapan masyarakat yang bertindak sebagai “komunitas interpretif”, diperoleh hasil bahwa penggunaan bahasa yang secara budaya bermakna negatif itu, yang dicontohkan oleh generasi tua, dapat merusak kepribadian generasi muda. Namun, dampak negatif itu diharapkan dapat diatasi dengan menerapkan etika berbahasa dalam bahasa daerah.

Kata kunci: bahasa, motivasi, kepribadian, kesantunan.

INDONESIAN LANGUAGE IN PUBLIC DOMAIN: ITS USE IN PUBLIC DEBATE

PRIOR TO THE PRESIDENTIAL ELECTION 2019

I Ketut Darma Laksana

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Denpasar

darmalaksana27@yahoo.com

Abstact

This paper discusses Indonesian language in public domain, especially in public debate. It is aimed at giving understanding to the readers about its use in public debate prior to presidential election 2019 which has made the people worried. The use of Indonesian through lexical choices that contain slander, incitement, and hate speech can threaten the unity of the nation. Therefore, the issues discussed are: (1) What is the thing behind the use of the language having negative meaning? (2) What is the impact for personal development of the nation? (3) How to avoid the use of the language that is not accordance to our national identity? There three research questions are discussed using deconstruction and ethnography of speaking methods. By applying these two methods, the results show that the speakers with a certain 'motivation' have created and developed new system of deviation along with the hope that they can play the 'language market', the value of language production making one's position that he is right and tries to influent people in order to believe in perception he has built. Meanwhile, by applying the ethnography of speaking method, the public's response that acts as 'interpretive community', it is found that the use of the language that has culturally negative meaning spoken out and modeled by old generation, can damage the young generation personality. However, it is expected that the negative impact can be handled by applying ethics in using the language, i.e. the local language.

Key words: language, motivation, personality, politeness.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggunaan bahasa dalam ruang publik terutama menjelang Pilpres 2019 menjadi isu yang menarik, namun juga penuh tantangan karena menyangkut perilaku berbahasa seseorang. Penulisan makalah ini harus diawali dengan pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan ruang publik? Menurut Kuper dan Kuper (2008), konsep ruang publik umumnya digunakan untuk merujuk pada *diskursus*

dan *debat publik*. Peserta yang terlibat di dalamnya bisa mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama (hlm. 880). Pelaksanaan *Kongres Bahasa Indonesia (KBI)*, *KBI--I* sampai dengan *KBI—XI* ini, lebih tepat disebut diskursus karena praktik kewacanaannya diatur oleh seperangkat konvensi yang disepakati sesuai dengan tema kongres. Bentuk diskursus dalam pelaksanaan kongres tersebut ditandai oleh pengungkapan pikiran secara formal dan teratur dengan alasan yang dapat diterima oleh umum. Meskipun berbeda-beda dalam waktu dan tema pelaksanaan kongres, masih terlihat kesamaan tujuan dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia agar berjaya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, diskursus yang terjadi dalam bidang sosial politik lebih didasarkan pada relasi kuasa. Oleh karena itu, diskursus yang dikendalikan oleh relasi kuasa berbeda-beda tujuannya sesuai dengan zamannya. Sebagai contoh, diskursus sosial politik pada masa revolusi bertujuan menggelorakan patriotisme rakyat untuk mencapai kemerdekaan, sehingga muncul diskursus seperti *Merdeka atau Mati, Indonesia Menggugat, Indonesia Merdeka*; masa pemerintahan Presiden Soekarno bertujuan menggalang semangat untuk menguatkan jati diri bangsa yang sudah merdeka, sehingga muncul diskursus seperti *Sekali Merdeka tetap Merdeka, Berdiri di Atas Kaki Sendiri, Hancurkan Imperialisme dan Neokolonialisme*; dan masa pemerintahan Presiden Soeharto bertujuan membangkitkan semangat untuk membangun manusia Indonesia secara keseluruhan, dengan diskursus seperti *Swasembada Pangan, Pembangunan SD Inpres, Keluarga Berencana*. Isu-isu yang dikemukakan juga berkaitan dengan kepentingan bersama, yakni untuk kemerdekaan, harga diri, dan kemakmuran bangsa.

Diskursus dalam bidang sosial politik pada masa lampau tersebut berbeda dengan diskursus pada era Reformasi saat ini, khususnya menjelang Pilpres 2019. Meskipun diskursus yang berlangsung juga dikendalikan oleh relasi kuasa, praktik kewacanaannya lebih tepat disebut *debat publik*. Namun, debat publik yang berlangsung semata-mata bertujuan untuk kepentingan politik/golongan, dengan sasaran “berebut istana”, sehingga debat diwarnai oleh pertengkaran. Alasan-alasan yang dikemukakan tidak berdasarkan bukti yang kuat, atau tidak masuk akal. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dinyatakan bahwa debat yang demikian disebut sebagai *debat kusir* (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012:301).

Era Reformasi yang ditandai oleh kebebasan berpendapat sering disalahtafsirkan oleh kelompok tertentu. Penggunaan bahasa Indonesia oleh pelibat dalam acara debat sungguh melanggar etika berbahasa yang hidup di masyarakat yang berpegang teguh pada kesantunan. Penggunaan kata-kata dengan tujuan memfitnah, menjelek-jelekkan, menghina, dan menyebar kebencian tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal inilah yang ditengarai dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Steinhauer (2003) bahwa “bahasa yang dimiliki bersama tidaklah menjamin kerukunan sosial; makin banyak orang mengerti hasutan, makin rawan masyarakatnya. Namun, orang yang fasih berbahasa bisa bertengkar mulut, sedangkan orang yang kehilangan kata tinggal baku hantam saja” (hlm. 5).

Hal tersebut di atas menjadi alasan pentingnya pemikiran yang dituangkan dalam makalah ini. Masyarakat umum perlu diberikan pemahaman betapa pentingnya hakikat sebuah bahasa karena dari bahasalah tercermin kepribadian suatu bangsa. Karena ulah orang-orang tertentu, kepribadian bangsa dapat tercoreng oleh perbuatan warganya sendiri. Bukankah ada peribahasa yang berbunyi *Bahasa menunjukkan bangsa*, suatu bangsa dapat dikenali dari bahasanya.

Masalah

Debat publik menjelang Pilpres 2019 yang kental bermuatan politik itulah yang dipertontonkan oleh pelibat ke khalayak ramai dengan cara yang tidak terpuji. Penggunaan kata-kata seperti *pengibulan*, *pro-asing*, *ganti presiden*, *partai Allah*, *partai setan*, dan sejenisnya jelas mengandung hasutan, fitnah, atau ujaran kebencian karena dilontarkan tanpa alasan yang masuk akal. Sehubungan dengan itu, makalah ini membahas permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa yang melatarbelakangi individu dalam penggunaan bahasanya?
- 2) Apa dampaknya bagi pengembangan kepribadian bangsa?
- 3) Bagaimana caranya menangkal etika berbahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa?

Masalah (1) bersangkutan dengan alasan/motivasi yang mendasari partisipan debat dalam penggunaan bahasanya. Masalah (2) bersangkutan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa yang cenderung sebagai pemecah belah persatuan bangsa. Sementara itu, masalah (3) berkenaan dengan model yang dapat digunakan yang bersumber dari dua bahasa dan/atau budaya Jawa dan Bali.

Tujuan

Pertikaian politik berdampak negatif bagi generasi muda yang sudah terlihat saat ini. Bagaimana tidak, sekelompok mahasiswa, sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah berani melontarkan hasutan dengan mengacungkan “kartu kuning” dan “kartu merah” yang ditujukan kepada presiden (*Kompas TV*, Medio April 2018). Mereka sudah termakan oleh isu negatif yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat di DPR ataupun tokoh politik tertentu di masyarakat. Inilah pengaruh buruk yang diciptakan oleh generasi tua dan tanpa penalaran yang baik telah merasuk ke dalam benak mahasiswa. Karena ulah segelintir mahasiswa dan elite politik tersebut, dapat dilihat pula di *YouTube* reaksi pemuda Papua yang “membela” presiden. Masyarakat sudah terbelah antara yang “pro” dan yang “kotra” calon presiden petahana/pemerintah sudah terlihat sekarang. Berdasarkan kenyataan tersebut, makalah ini bertujuan untuk:

- 1) melakukan pembongkaran-sistem atas sistem yang dibangun oleh peserta debat;
- 2) melihat dampak negatif debat yang etika bahasanya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
- 3) menyusun formula yang dapat dijadikan instrumen dalam membentuk kepribadian bangsa yang santun.

Urgensi

Makalah ini disusun berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam debat publik, terutama pilihan kata-katanya, yang melanggar kesantunan berbahasa. Kata-kata yang bermakna ‘menghasut’ akan berpengaruh besar pada stabilitas sosial kemasyarakatan. Pemerintah yang sedang berkonsentrasi memeratakan pembangunan di seluruh tanah air terganggu oleh hiruk pikuk perdebatan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang sehat. Kondisi perpolitikan yang sekarang berkembang, yang ditengarai sebagai “perebutan istana”, mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sistem kebahasaan yang dibangun oleh politisi sarat dengan kepentingan politik/golongan dengan menghalalkan berbagai cara.

Sesungguhnya, cara yang bermartabat dalam menyampaikan kritikan dapat tetap dijaga dengan bercermin pada kepribadian bangsa, yang dikenal dengan kesantunannya. Dengan demikian, keutamaan pemikiran yang dituangkan dalam makalah ini ialah dalam upaya peneguhan kepribadian bangsa dengan menyodorkan formula yang diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengubah perilaku berbahasa yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengacu pada kesantunan dalam bahasa daerah *Jawa* dan *Bali* diharapkan perilaku berbahasa yang “menyimpang” dapat diluruskan ke arah yang lebih baik.

Tinjauan Pustaka

Halliday dan Hasan (1985) menyatakan bahwa untuk memahami suatu tuturan seseorang harus memperhatikan tiga hal berikut: (1) Apa yang dibicarakan (*field*), (2) Siapa yang menjadi partisipan dalam komunikasi (*tenor*), dan (3) Bagaimana cara menyampaikan pesan (*mode*) (hlm. 25). Pandangan ini dapat dipakai mengkaji bentuk, makna, dan fungsi tuturan yang digunakan dalam debat publik yang berlangsung saat ini. Hal yang dibicarakan berkaitan dengan dunia perpolitikan Indonesia menjelang Pilpres 2019. Kemudian, partisipan dalam debat terbelah menjadi yang “pro” dan yang “kontra” pemerintah. Sementara itu, dalam penyampaian gagasan partisipan menggunakan bahasa Indonesia dengan pilihan kata yang dapat menyudutkan lawan politik.

Kosakata umum yang digunakan oleh peserta debat terdapat dalam kamus, seperti *KBBI* (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012), yang menyediakan definisi makna kata, baik yang bersifat literal maupun yang bersifat kias, yang dapat dipilih oleh pemakai bahasa sesuai dengan konteks dan situasi. Selain kosakata umum, menurut Wardhaugh (1986), penggunaan kata-kata sapaan dapat menandai posisi sosial seseorang (hlm. 252). Hal ini juga dapat dilihat penggunaannya dalam debat publik yang dikaji dalam makalah ini. Jadi, pencitraan diri tokoh sangat penting dilakukan oleh peserta debat dengan cara memberdayakan unsur-unsur bahasa sesuai dengan kepentingan.

Pembicaraan mengenai kesantunan berbahasa menjadi sorotan masyarakat setelah menyaksikan penggunaan bahasa dalam debat publik yang berlangsung menjelang Pilpres 2019. Sehubungan dengan itu, penting ditinjau beberapa kepustakaan yang berbicara tentang kesantunan berbahasa, yaitu sebagai berikut. Duranti (1997) menyatakan bahwa bahasa, termasuk dalam hal ini kesantunan, merupakan sumber daya kultural dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan praktik berbahasa (hlm. 2). Namun, dalam debat publik menjelang Pilpres 2019 terdapat kesenjangan yang lebar antara bahasa sebagai sumber daya kultural dan bahasa sebagai praktik berbahasa tersebut.

Kemudian, Salzmann (1998) menyatakan pula bahwa kesantunan (*politeness*) merupakan wujud praktik berbahasa itu, sebagaimana dicontohkannya dalam bahasa Jepang. Dalam masyarakat Jepang kesantunan berbahasa tetap bertahan. Hal ini terjadi karena generasi tua mewariskan budaya leluhurnya kepada generasi muda (hlm. 195—196). Akan tetapi, dalam masyarakat Indonesia--demi kepentingan politik tertentu--diharapkan kejadian ini berlangsung sesaat, penyimpangan kesantunan bahasa telah memberi citra yang buruk bagi bangsa. Generasi tua seharusnya memberikan teladan yang baik kepada generasi muda, bukan sebaliknya, teladan yang buruk.

Namun, masih ada upaya untuk mengatasi kondisi yang ditimbulkan oleh pergolakan politik saat ini. Sehubungan dengan itu, etika bahasa dalam bahasa daerah dapat diterapkan dalam membentuk kesantunan berbahasa seseorang. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa etika bahasa

dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa *Jawa* dan *Bali*, dapat dipakai contoh tentang kesantunan berbahasa. Kedua bahasa tersebut telah dikaji secara luas oleh para ahli dan pemerhati mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan, seperti yang disajikan di bawah ini.

Dalam artikelnya, Gonda (1975) mengkaji kosakata bahasa Jawa, yang berhubungan dengan “ketakziman”, bahwa pemakaian kedua varietas bahasa “alus-kasar” (*kromo-ngoko*) tidak sekadar berkaitan dengan fenomena tabu (larangan), tetapi lebih dari itu, yakni kebutuhan akan komunikasi dalam masyarakat Jawa yang mengenal kesantunan berbahasa. Selanjutnya, Gonda menyatakan bahwa bentuk-bentuk bahasa yang bersifat kolokial berdasarkan kebiasaan dan tata krama dilarang digunakan oleh penutur jika ia menyapa orang lain yang lebih tinggi status atau kedudukan sosialnya. Akan tetapi, penutur yang status atau kedudukan sosialnya lebih tinggi menggunakan bentuk bahasa yang bersifat kolokial tersebut (hlm. 333). Pandangan mengenai perbedaan penggunaan undak usuk itu mungkin perlu dipertimbangkan. Maksudnya, apa pun perbedaan sosialnya, demi saling menghormati, tidak ada salahnya bila orang yang lebih tinggi kedudukan sosialnya berbahasa *kromo* pula terhadap mitra tuturnya yang lebih rendah kedudukan sosialnya. Namun, bila terdapat kesepahaman dalam komunikasi yang menyangkut *kromo-ngoko* tersebut tentu tidak menimbulkan masalah.

Sementara itu, Geertz (1975) mengemukakan bahwa bahasa Jawa mengenal undak usuk bahasa, yaitu *kromo* dan *ngoko*. Masyarakat penuturnya tetap mempertahankannya sebagai kontrol sosial dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang rumit ialah bahwa orang Jawa memolakan perilaku ujaran mereka dalam kaitannya dengan halus-kasar berpangkal di sekitar perilaku sosial yang mereka bangun pada umumnya. Seseorang yang berbicara dengan mitra tutur yang statusnya lebih tinggi (superior), misalnya priyayi atau pejabat, akan menggunakan bahasa *kromo*. Sebaliknya, seseorang yang berbicara dengan mitra tutur yang statusnya lebih rendah (inferior), yang disebut abangan, akan menggunakan bahasa *ngoko* (Geertz, 1975:167).

Poedjosoedarmo (1986) juga berbicara tentang tingkatan-tingkatan bahasa (*speech levels*) dalam bahasa Jawa. Tingkatan-tingkatan bahasa itu menunjukkan sikap penutur terhadap mitra tuturnya. Poedjosoedarmo menyatakan, pada dasarnya tingkatan bahasa itu dibedakan atas tiga jenis. *Ngoko* merupakan level sikap sosial yang tak bermarkah (*unmarked*). Sikap ini menunjukkan kedekatan dan tidak formal. *Krama* adalah tingkat bahasa formal dan santun. *Madya* adalah tingkat bahasa yang bersifat semi-formal (hlm. 67).

Akan tetapi, pandangan terakhir yang diperoleh (M. Wajdi, komunikasi pribadi, 14 Mei, 2013) menyebutkan bahwa undak usuk bahasa Jawa lebih sederhana daripada apa yang dikemukakan oleh Poedjosoedarmo di atas karena perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki kemudahan dalam berkomunikasi, namun tetap mempertahankan hakikat kesantunan dalam masyarakatnya. Di bawah ini disajikan beberapa contoh penggunaan *ngoko-kromo* dalam bahasa Jawa (dikutip dari Geertz, 1974:167):

- (1) *Penjenengan saking tindak pundi* (*kromo*)
- (2) *Kowe saka endi* (*ngoko*)

(Artinya: ‘Engkau datang dari mana?’)

Kalimat (1) diucapkan oleh seorang dari status sosial yang lebih rendah (inferior) terhadap orang lain yang status sosialnya lebih tinggi (superior). Sebaliknya, kalimat (2) diucapkan oleh seorang dari status sosial yang lebih tinggi (superior) terhadap orang lain yang status sosialnya lebih rendah (inferior).

Sementara itu, dalam bahasa Bali, Laksana (2009), yang mengutip pandangan I Gusti Ngurah Bagus dalam disertasinya (1979) tentang pemakaian bentuk hormat dalam bahasa Bali, menyatakan ihwal kesantunan bahasa atau bentuk hormat dalam bahasa Bali juga tetap bertahan dalam praktik berbahasa masyarakatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian yang memalukan pernah terjadi tahun 1970-an. Akibat pelanggaran kesantunan bahasa terjadi pertengkaran penutur antarkasta di Bali. Penggunaan undak usuk yang dikenal dalam masyarakat Bali dengan istilah *alus* dan *lumrah* berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam hal ini perbedaan kasta (Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra) (hlm. 51).

Kersten (1984) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat beradab, orang menyesuaikan bahasanya kepada kedudukan orang yang diajak berbicara, ataupun kepada kedudukan orang yang dibicarakannya. Jika orang Bali berbicara kepada seseorang yang sama atau lebih rendah kedudukannya serta rapat pergaulan dengannya, maka ia tidak memilih-milih kata: bahasanya bahasa biasa saja. Jenis bahasa itu sering disebut bahasa kasar, tetapi bahasa itu sedikit pun tidak kurang sopan jika dipergunakan dalam pembicaraan yang menyangkut kesetaraan dan keakraban. Sebaliknya, bahasa hormat digunakan jika seseorang berbicara kepada orang yang hendak dimuliakannya, ia menggunakan kata-kata halus, sejauh ada. Jika tidak ada kata halus, ia menggunakan bahasa biasa. Bandingkan dua kalimat bahasa Bali berikut (hlm. 16). Bandingkan kedua contoh di bawah ini:

- (3) I Kelor *nyedayang* Anake Agung (bahasa halus)
'Kelor membunuh Anak Agung'
- (4) Anake Agung *ngamatiyang* I Kelor (bahasa biasa)
'Anak Agung membunuh Kelor'

Kata *nyedayang* 'membunuh' pada (3) digunakan untuk orang yang lebih tinggi kastanya. Sementara itu, kata *ngamatiyang* pada (4) digunakan untuk orang yang lebih rendah kastanya.

Dengan pemahaman yang sama, Tinggen (1995) mengemukakan bahwa undak usuk, bahasa Bali disebut *sor singgih*, penting dipahami oleh masyarakat Bali yang mengenal stratifikasi sosial. Dampak dari ketidakpahaman seseorang akan undak usuk bahasa itu tidak jarang terjadi ketersinggungan antarpenutur. Sama seperti apa yang dikemukakan di atas, pertentangan antarkasta tersebut menyulut polemik tentang pentingnya undak usuk itu dipertahankan.

Foley (1997), dalam pembicaraannya mengenai kesantunan bahasa, memberikan perhatian pada bahasa Bali dengan menggunakan contoh undak usuk dalam bahasa yang bersangkutan. Kesantunan (*politeness*) dalam berbahasa itu berfungsi menjaga keharmonisan hubungan sosial penutur. Perbedaan penggunaan undak usuk dalam bahasa Bali dapat dilihat pada contoh berikut (hlm. 327):

- (5) Pekak Putu *lakar was* kija (*lumrah*)
'Kakek Putu akan pergi ke mana'
- (6) Titiang *jagi lunga* ke pasar (*alus*)
'Saya akan pergi ke pasar'

Kalimat (5) diucapkan oleh seseorang yang kastanya yang lebih tinggi (Brahmana: *Ida Bagus*) terhadap orang lain yang kastanya rendah (Sudra: *Pekak Putu*): penggunaan kata *lakar* 'akan' dan *was* 'pergi'. Sebaliknya, kalimat (6) diucapkan oleh seorang Sudra terhadap seorang Brahmana: penggunaan kata *jagi* dan *lunga* 'pergi'.

Kedua bahasa daerah tersebut di atas memang memperlihatkan kesamaan sejarah masa lampau. Tingkatan bahasa *alus* dan *lumrah* dalam bahasa Bali merupakan percampuran

budaya Jawa. Hal penting yang perlu dicatat dari kedua bahasa daerah tersebut ialah bahwa terdapat pandangan yang sama dalam menghadapi orang lain sebagai mitra tutur. Pada orang Jawa dikenal pandangan “lebih baik menghargai orang lain daripada menghargai diri sendiri”. Semetara itu, pada orang Bali dikenal pandangan yang dinamakan *Tat Twam Asi*, artinya: ‘Aku adalah engkau, Engkau adalah aku’, jika orang berbicara santun maka dibalas dengan santun pula.

Kedua contoh etika berbahasa tersebut dapat diterapkan dalam menciptakan kesantunan berbahasa, sekalipun dalam konteks politik. Dengan demikian, inti dari sumbangan etika bahasa dalam bahasa daerah adalah penerapan “pengalaman” belajar bahasa daerah mengenai kesantunan berbahasa, khususnya dalam komunikasi publik, yang, dalam hal ini, bahasa Indonesia sebagai medianya.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. *Pertama*, teori Pos-Strukturalisme atau disebut juga Posmodernisme, dengan tokoh-tokohnya seperti Derrida, Foucault, Bourdieu, Lser, dan Fish. Teori yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh tersebut memiliki kesamaan metodologis. *Metode dekonstruksi* yang menjadi karakteristik analisis data teori Pos-Strukturalisme digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembongkaran-sistem atas sistem yang dibangun dalam wacana politik yang berupa debat publik. Di bawah ini disajikan pandangan mereka satu per satu.

Derrida (2008) menolak pandangan teori Strukturalisme dari Saussure (1988) mengenai hubungan antara penanda dan petanda yang sepenuhnya bersifat arbitrer dan murni bersifat sintaktis-formal (hlm. 64—65). Menurut Derrida (dalam Sim dan van Loon, 2008:88--89; lihat juga Lubis, 2014:38--39), hubungan antara kata dan maknanya memungkinkan adanya “motivasi” oleh pemakai bahasa. Dengan kata lain, makna sebuah kata tergantung pada penggunaan atau konteksnya. Namun, pandangan Saussure masih dapat digunakan untuk melihat bahwa dalam “struktur kalimat” makna sebuah kata ditentukan oleh makna kata lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari dua kalimat bahasa Inggris, yang dikutip dari Duranti (1997:327), berikut:

- (7) I can't draw a straight *line* without ruler
- (8) People must form a *line* if they want to be served

Dalam kalimat (7) dan (8), makna kata *line* ditentukan oleh kata yang mendahuluinya: *draw* pada (7) dan *form* pada (8). Akan tetapi, pandangan dalam teori Strukturalisme tersebut tidak bisa digunakan untuk mencari “motivasi” di balik penggunaan kata.

Dalam dekonstruksi, analisis diarahkan dari pembangunan-sistem ke pembongkaran-sistem. Pembongkaran sistem menghasilkan “motivasi” pengguna bahasa untuk menjatuhkan lawan dengan melakukan hasutan, fitnah, atau ujaran kebencian. Di sini, pengguna bahasa, menurut Bourdieu (dalam Lubis, 2014:117), telah memainkan apa yang disebutnya “pasar bahasa”, yakni upaya seseorang untuk mengambil keuntungan pribadi/golongan sehingga dapat membentuk status/posisinya sebagai seseorang yang benar dan pantas dicontoh.

Sementara itu, Foucault (2016; lihat juga Lubis, 2014) menegaskan bahwa debat publik seperti yang berlangsung saat ini mengandung “epistem”, yaitu struktur pemikiran tertentu

mengenai keseluruhan nilai yang menyatukan praktik diskursif, pada suatu masa, yang memunculkan pola-pola epistemologis (hlm. 402; lihat juga Lubis: hlm.69).

Pembongkaran-sistem yang telah dilakukan atas pembangunan-sistem dan kembali dilakukan “pembangunan-sistem” oleh peneliti berupa penguatan kembali sistem yang telah berlaku dalam masyarakat. Namun, apabila terdapat inovasi, dalam hal ini kesantunan berbahasa, misalnya penggunaan kata *sampeyan* dalam bahasa Jawa untuk menyapa orang yang diajak berbicara ketika berbahasa Indonesia, terjadilah sebuah revitalisasi kesantunan dalam bahasa Indonesia.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa dalam debat publik dapat digali dengan mengacu pada pandangan Iser dan Fish (Sim dan van Loon, 2008) dalam Teori Resepsi, disebut juga Teori Respons-Pembaca, yang berkonsentrasi pada keterlibatan/interaksi pembaca dengan teks/wacana yang disampaikan. Makna tekstual dipandang dapat hadir dari keterlibatan pembaca dan teks, dengan penekanan bahwa pembaca sepenuhnya bertanggung jawab atas ciptaan maknanya. Tokoh Teori Respons-Pembaca tersebut memandang pembaca merupakan seorang anggota dari “komunitas interpretif” karena nilai-nilai dari setiap anggotanya memengaruhi pembacaan individual sebagaimana hal itu akan memberikan sebuah kriteria untuk menilai validitasnya (hlm. 84—85).

Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa yang bersifat menghasut, menghina, membohong, pemahaman pembaca mencapai validitasnya karena mereka hidup dalam budaya yang sama. Secara etnografis, mereka merupakan pendukung budaya daerah yang dikenal dengan kesatuan bahasanya. Mereka juga pendukung bahasa Indonesia yang mengerti kata-kata yang mengandung hasutan, fitnah, atau ujaran kebencian. Pandangan Teori Respons-Pembaca tersebut dapat mengungkap “motivasi” yang melandasi penggunaan bahasa dalam debat publik menjelang Pilpres 2019 yang sedang berlangsung saat ini.

Kedua, Teori Linguistik Antropologi/Antropologi Linguistik diacu untuk mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Benjamin Lee Whorf, sebagaimana yang dikutip oleh Salzmann (1998:42), menyebutkan bahwa cara berpikir seseorang tercermin dalam bahasa yang digunakan. Berkaitan dengan pandangan tersebut, bahasa daerah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap dapat memengaruhi penutur dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Sebagai masyarakat “dwibahasawan”, penutur yang menggunakan bahasa Indonesia diharapkan dapat menerapkan pengalaman beretika bahasa dalam bahasa daerah mereka yang mengenal kesantunan berbahasa. Dengan demikian, penerapan kesantunan berbahasa dalam bahasa daerah menjadi dasar pembentukan kepribadian bangsa secara keseluruhan.

Sehubungan dengan itu, menurut Harris (1991), setiap individu sesungguhnya memiliki apa yang dinamakan “struktur kepribadian dasar” yang tercermin dalam kesantunan berbahasa yang dapat dijumpai pada setiap anggota masyarakat. Jika populasi yang tercakup diorganisasikan ke dalam suatu negara/bangsa, maka struktur kepribadian dasar itu disebut *karakter bangsa/nasional* (hlm. 273). Jadi, dalam konteks budaya, kesantunan yang dimiliki bersama oleh masyarakat Indonesia merupakan karakter bangsa Indonesia.

Pandangan Duranti (1997) di atas mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan penting untuk dicermati, yakni mengenai penerusan kesantunan bahasa sebagai sumber daya kultural. Orang-orang dari kelompok masyarakat tertentu kemungkinan gagal atau tidak mau mempraktikkan sumber daya kultural itu dalam praktik berbahasa. Penerusannya dari satu generasi ke generasi

berikutnya akan menjadi tolok ukur bagi keseimbangan budaya dalam suatu masyarakat madani seperti Indonesia. Oleh karena itu, sumber persoalannya harus dicari apakah generasi tua sudah memberikan keteladanan yang baik atau buruk mengenai kesantunan berbahasa itu kepada generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data lisan yang bersumber dari tayangan debat publik Pilpres 2019 di televisi dan media *online* (YouTube) periode Januari sampai dengan medio Mei 2018. Sementara itu, data tulisan diambil dari surat kabar (*Kompas*), kamus bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, 2012), kamus bahasa Bali (Kersten, *Bahasa Bali: Tata bahasa dan kamus lumrah*, 1984), dan hasil penelitian dalam bahasa Jawa (Poedjosoedarmo, Seri *NUSA* vol. 24, 1986). Kedua jenis data tersebut dikutip dengan menuliskannya pada kartu (teknik catat) untuk memudahkan tahap analisis data.

Namun, dalam upaya mengetahui “permainan makna” kata-kata dari pengguna bahasa dalam debat yang dianggap menyimpang dari pemahaman umum pemakai bahasa Indonesia, dilakukan pula wawancara terhadap sepuluh narasumber yang dijumpai secara kebetulan. Bersama peneliti, mereka diperlakukan sebagai instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang bertindak sebagai “komunitas interpretif” dalam memaknai kata-kata yang digunakan dalam debat.

Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode dekonstruksi. Melalui metode dekonstruksi dapat dipahami bahwa pengguna bahasa berusaha menyimpangkan makna. Dengan cara seperti itu, ia berharap dapat memenangkan kontestasi dalam Pilpres 2019 yang akan datang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan interpretasi atas penggunaan bahasa Indonesia melalui pilihan kata yang bersifat negatif tersebut, permasalahan yang diajukan dalam makalah ini akan dibahas dalam sub-subbagian berikut.

Motivasi Individu dalam Penggunaan Bahasanya

Berdasarkan pembongkaran-sistem terhadap sistem yang dibangun oleh pelibat dalam debat publik yang berlangsung saat ini diperoleh hasil yang berikut.

Data:

- (9) Pembagian sertifikat tanah adalah *pengibulan*
- (10) Indonesia akan *bubar* tahun 2030
- (11) Partai *Allah* dan partai *setan*

Makna kata-kata *pengibulan*, *bubar*, *Allah*, dan *setan* seperti yang tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012) bersifat “netral”, yakni merujuk pada makna denotatif. Namun, dalam konteks atau penggunaannya seperti contoh di atas, kata-kata tersebut sudah terbuka maknanya untuk hal yang lain, makna konotatif. Dengan kata lain, penggunaannya telah di-“motivasi” oleh kepentingan politik tertentu. Penggunaannya juga dilatarbelakangi oleh kepentingan

individu dengan memainkan “pasar bahasa”, dengan tujuan menciptakan status/posisi tawar dalam kontestasi perebutan kekuasaan dalam Pilpres 2019.

Pembaca atau penonton dalam debat publik tersebut memiliki peran sebagai “komunitas interpretif”, mereka bisa memberikan respons apakah penggunaan bahasa oleh pelibat debat positif ataukah negatif. Kenyataan menunjukkan bahwa dari sepuluh responden yang dijumpai secara kebetulan semuanya menyatakan bahwa kata-kata yang digunakan seperti pada (9), (10), dan (11) di atas secara kontekstual tergolong kata-kata yang bermakna negatif. Pemahaman mereka berdasarkan konteks situasi saat ini bahwa para politisi yang bedebat itu mempunyai agenda tertentu untuk memenangkan golongannya. Dengan demikian, kenyataan memang menunjukkan telah terjadi polarisasi masyarakat menjelang Pilpres 2019.

Berita yang bertajuk “Langkah Maju Jokowi” yang ditulis oleh Gutomo Bayu Aji (*Kompas*, 18 April 2018, hlm. 6) telah membantah sindiran yang mengatakan bahwa program sertifikat tanah sekarang sebagai reformasi agraria *ngibul*. Walaupun memicu polemik, sindiran itu kurang memperlihatkan kontribusi diskursif terhadap pemikiran serta kebijakan reformasi agraria. Baik kritik maupun penjelasan pada polemik itu kurang menyentuh substansi diferensiasi agraria yang menciptakan jurang ketimpangan. Selain itu, polemik juga tidak menyentuh strategi politik reformasi agraria sebagai suatu “gebrakan cepat”. Namun, kata *ngibul* atau *pengibulan* sendiri perlu dicocokkan dengan penjelasan maknanya yang terdapat di dalam kamus.

Kata *kibul*, *mengibul* berarti ‘berbohong; membohong’. Kemudian, *pengibulan* berarti ‘proses, cara, perbuatan mengibul’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012:696). Berdasarkan penjelasan makna ini dan ulasan yang termuat dalam harian *Kompas* itu, maka penggunaan kata *pengibulan* dalam konteks kalimat (9) jelas mengandung ‘kebohongan/fitnah’ yang dibuat oleh lawan politik.

Kata *bubar* berarti ‘bercerai berai; selesai; usai’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012:213). Dalam kalimat (10) tersebut, seseorang bermaksud melontarkan sindiran kepada pemerintah, namun tanpa bukti atau alasan yang masuk akal. Respons yang disampaikan oleh pihak istana bahwa “kritikan” itu tidak berdasarkan bukti sama sekali. Malahan, Indonesia akan mencapai puncak “keemasan” pada tahun 2045. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam kalimat (10) itu juga merupakan “berita bohong” (*hoax*).

Selanjutnya, kata *Allah* dan *setan* masing-masing mengandung makna sebagai berikut. *Allah* berarti ‘nama Tuhan dalam bahasa Arab; pencipta alam semesta yang Mahasempurna; Tuhan Yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012:42). Sementara itu, *setan* berarti ‘roh jahat (yang selalu menggoda supaya berbuat jahat)’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012:1294). Kalimat (11) juga digunakan oleh seseorang untuk menyindir lawan politiknya. Penutur bermaksud mengatakan bahwa partai mana yang sehaluan (sekoalisi) dengan partainya adalah partai orang-orang yang beriman, sedangkan partai lainnya yang tidak sehaluan adalah “partai setan”. Dapat diterka apa reaksi partai yang disebut “partai setan” itu: Kami beragama, menyembah Allah, pencipta alam semesta sama seperti Anda. Yang mengetahui tentang “partai Allah” adalah Allah sendiri. Ketua umum sebuah partai (*YouTube*, Mei 2018) menyarankan agar orang yang menyebar fitnah tersebut bisa menggunakan diksi yang benar karena sindiran yang disampaikannya mengandung ujaran kebencian (*hate speech*). Kebohongan dan ujaran kebencian mengandung “motivasi” pelaku debat sebagai strategi untuk memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2019.

Dampak Negatif Penggunaan Bahasa

Acara debat yang berlangsung di *KompasTv* (Senin, 26 April pukul 0.9.00 Wita) bertajuk “Riuh Polarisasi Masyarakat Jelang Pilpres 2019” sudah menandai bahwa masyarakat terbelah antara yang pro-pemerintah dan yang kontra-pemerintah. Perseteruan tidak saja di tingkat elite partai, tetapi juga menyentuh akar rumput. Banyak orang yang kontra-pemerintah menyuarakan “permusuhan”. Perhatikan, misalnya, adanya perang tagar (tanda pagar: #) dan debat kusir jelang Pilpres 2019. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: “Siapa yang memulai”. Pilpres yang akan berlangsung tahun 2019 dari sekarang orang sudah menabuh “genderang perang”. Perhatikan contoh di bawah ini:

(12) *#Tahun 2019 Ganti presiden*

(13) *Rakyat menginginkan presiden baru*

(14) *Presiden kita mestinya seperti Putin*

Contoh-contoh di atas menggambarkan kenyataan bahwa telah terjadi pertarungan politik di negara kita yang semakin panas dan tak bermoral, lebih “keras” dari Pilpres 2014. Petinggi partai tertentu yang berseberangan dengan pemerintahlah yang membuat ulah seperti itu. Tokoh partai tersebut yang juga pantas disebut sebagai “biang” perpecahan antarwarga masyarakat. Ada tokoh politik tertentu yang secara vulgar mempertontonkan di ruang publik baju kaos yang bertuliskan “*Ganti Presiden 2019*” (12) dan “*Rakyat menginginkan presiden baru*” (13), serta ada tokoh yang menginginkan “*Presiden kita semestinya seperti Putin*” (presiden Rusia) (14).

Apa reaksi dari lawan politik mereka. Belum apa-apa sudah ganti presiden: dengan baju kaos lagi, bukan dengan adu visi dan misi (program). Kemudian, mengapa mesti seperti Putin, Indonesia bukan negara komunis. Jadi, demi ambisi politik/golongan orang bisa berbuat sesuka hatinya. Kebebasan sering disalahtafsirkan oleh orang-orang tertentu. Memang, orang bijak mengatakan, “Hati manusia memang dapat dikembalikan pada kodratnya: yang baik dan yang buruk”. Namun, masih beruntung bangsa ini masih memiliki banyak tokoh yang santun, yang mengayomi. Oleh karena itu, masyarakat umumnya selalu berharap agar Indonesia tetap damai, masyarakatnya menyanggah predikat “masyarakat madani”, masyarakat yang menghargai perbedaan.

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa generasi tua semestinya memberi teladan yang baik bagi generasi muda, bukan sebaliknya, mempertontonkan perilaku yang “tidak elok” di depan umum. Terhadap orang-orang yang menyebar ujaran kebencian, kebohongan, dan sejenisnya pada akhirnya menuai “hujatan” pula dari kelompok masyarakat tertentu (silakan lihat *YouTube!*). Itulah dampak penggunaan bahasa yang mengandung hasutan, terutama dampak negatifnya bagi pengembangan kepribadian bangsa.

Kesantunan Bahasa

Kesantunan dalam Bahasa Indonesia

Dalam bahasa Indonesia, kesantunan berbahasa tidak serumit seperti dalam bahasa daerah. Namun, dalam hal kosakatanya, bahasa Indonesia tetap membedakan mana kata yang pantas dan mana yang tidak pantas ditujukan kepada seseorang. Sebagai contoh, kata *bapak* merupakan kata yang santun jika ditujukan kepada seorang laki-laki yang sudah berusia tua atau yang dihormati.

Kesantunan bahasa itu tidak saja ditandai oleh pilihan kata yang digunakan oleh penutur, seperti telah dikemukakan di atas, tetapi juga ditentukan oleh keseluruhan tuturan. Suatu tuturan yang tidak santun dapat dinilai dari pemahaman masyarakat penutur bahasa Indonesia yang bercermin pula pada bahasa daerahnya. Ucapan seorang tokoh partai dan juga berlatar belakang santri tidak pantas melontarkan tuturan seperti di bawah ini (*Kompas TV*, 19 April, 2018 pukul 09 Wita):

(15) *Prabowo bisa menang kalau saya jadi cawapresnya*

(16) *Joko Widodo bisa kalah kalau saya tidak jadi cawapresnya*

Kedua tuturan di atas bukan ujaran kebencian, namun tetap tidak santun karena dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok lain. Sebuah “pernyataan” yang melibatkan tokoh tertentu dengan d juga mengandung “motivasi” tertentu, untuk menakut-nakuti, sehingga tuturan (15) dan (16) tersebut perlu dijadikan pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan.

Kesantunan dalam Bahasa Daerah

Gengsi Bahasa Daerah

Alokasi yang berbeda-beda antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan sendirinya mendudukan bahasa Indonesia pada kedudukan yang tinggi daripada bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipakai sebagai lambang identitas bangsa secara keseluruhan, suatu kedudukan yang tidak mungkin disandang oleh bahasa daerah. Bahasa Indonesia boleh dikatakan menikmati perlakuan khusus dalam banyak situasi, khususnya dalam situasi resmi kenegaraan, ia dipakai di bidang administrasi, pemerintahan, pendidikan, kemiliteran, perdagangan, keagamaan, dan penerangan.

Akan tetapi, dalam pandangan penutur bahasa daerah, kedudukan bahasa daerah mereka tidak dengan sendirinya lebih rendah daripada bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya bahasa daerah adalah sarana penyimpan khazanah adat dan budaya daerah yang tidak dapat digantikan oleh bahasa Indonesia. Atas dasar inilah bahasa daerah memiliki “gengsi”. Gengsi ini kemudian dapat menjadi perekat di tingkat daerah dan diharapkan pula menopang persatuan bangsa/nasional.

Mengapa Bahasa Jawa dan Bali?

Etika berbahasa dalam bahasa daerah berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya di Indonesia. Bahasa Jawa dan Bali memiliki kesamaan sejarah masa lampau, selain sudah dikenal luas, sehingga dapat dijadikan model tentang etika berbahasa masyarakat pada umumnya. Jejak sejarah mengenai kesamaan etika berbahasa kedua bahasa itu dapat ditelusuri dari tinggalan ekspedisi laskar kerajaan Majapahit.

Di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1258 Saka (1336 M). Menurut Zoetmulder (1985), laskar Majapahit yang membanggakan diri sebagai bangsawan Jawa tidak ingin kembali ke Majapahit (Jawa), tetapi lebih memilih untuk menetap di Bali. Laskar Majapahit yang sudah berbahasa Jawa-Pertengahan, sebagaimana yang digunakan dalam *Kitab Pararaton*, telah memengaruhi bahasa Bali dengan tingkatan-tingkatan bahasanya. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahasa dan kebudayaan Jawa dan Bali kemudian telah dijadikan bahan kajian oleh para ahli ataupun pemerhati bidang bahasa dan kebudayaan.

Kosakata Bahasa Jawa dan Bahasa Bali dengan

Imbangannya dalam Bahasa Indonesia

Pada bagian ini disajikan kosakata bahasa Jawa dan Bali dalam kalimat serta imbangannya dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan sajian ketiga bahasa tersebut dapat dilihat rumitnya kesantunan bahasa daerah Jawa dan Bali jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Bahasa Jawa <i>Ngoko</i>	<i>Kromo</i>	Bahasa Indonesia
(17) Bapak <i>wis</i> yuswa	Bapak <i>sampun</i> yuswa	'Bapak sudah tua'
(18) Sigit <i>nyaosake</i> permen-e marang Bapak	Sigit <i>nyaosaken</i> permen-ipun dhateng Bapak	'Sigit member permen itu kepada Bapak'
(19) Roti kui <i>di-pundhut</i> Bapak	Roti punika <i>dipun-pundhut</i> Bapak	'Roti itu sudah dibawa oleh Bapak'
(20) Anggit nyuwun <i>dhuwit</i> Bapak	Anggit nyuwun <i>arta</i> Bapak	'Anggit menanyi Bapak sejumlah uang'
(21) Bapak sowan <i>marang</i> Pak Guru (Dikutip dari Poedjosoedarmo, 1986:67--71)	Bapak sowan <i>dhateng</i> Pak Guru	'Bapak mengunjungi Pak Guru'

Bahasa Bali <i>Lumrah</i>	<i>Alus</i>	Bahasa Indonesia
(22) Tiang <i>ningeh orta</i> panak Meme	Tiang <i>miragi orti</i> pianak Meme	'Saya mendengar berita anak Ibu'
(23) <i>la mara teka di desa</i>	<i>ipunwawu rauh ringdesa</i>	'la baru datang di desa'
(24) <i>Kurenane suba mulih</i>	<i>Rabin-ida sampun mantuk</i>	'Istrinya sudah pulang'
(25) <i>la maang nyamane uma</i> atuluk	<i>ipun nguwehin semeton-ida</i> carik atuluk	'la member saudaranya sebidang sawah'
(26) <i>Maketelun ia ditu</i> (Dikutip dari Kersten, 1984:24--26)	<i>Maketigang raina ipun irika</i>	'Selama tiga hari ia di sana'

Istilah Menyapa dan Menyebut

Selain kosakata umum yang menandai kesantunan berbahasa, istilah menyapa dan menyebut juga merupakan dua hal yang penting dalam bertutur sapa. Dalam sebuah komunikasi, apalagi yang sifatnya tatap-muka, kata-kata sapaan atau sebutan juga penting diperhatikan oleh komunikan. Uraian di bawah ini menyajikan perbandingan antara bahasa Indonesia yang digunakan dalam debat dan bahasa daerah Jawa dan Bali yang dijadikan model kesantunan berbahasa.

Istilah menyapa

Istilah menyapa digunakan untuk menyapa orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Sapaan yang digunakan sesuai dengan usia dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Sapaan dalam bahasa Indonesia

Istilah menyapa dalam bahasa Indonesia, seperti *engkau* dan *kamu* biasa digunakan untuk menyapa di antara anak-anak muda yang seusia. Dalam debat masih terlihat penggunaan sapaan *kau*, kependekan dari *engkau*, oleh pelibat untuk menyapa pelibat lainnya, seperti contoh di bawah ini:

(27) Kuingatkan *kau* ya bagaimana

Sapaan *kau* dalam konteks umum seperti dalam debat tersebut kurang tepat karena pelibat berusia tua. Berbeda halnya dengan pertunjukan sinetron yang pemainnya berusia muda, sapaan *kau* masih pantas digunakan. Sesungguhnya, ada sapaan yang lain, yakni *saudara* atau *bapak*, yang dapat digunakan untuk menyapa lawan bicara, seperti contoh berikut:

(28) Siapa yang *Saudara* maksudkan?

(29) Siapa yang *Bapak* maksudkan?

Belakangan dikenal sapaan *Anda* yang setara fungsinya sama dengan *Saudara*, namun sapaan ini tetap harus mempertimbangkan siapa orang yang diajak berbicara. Bandingkan:

(30) Siapa yang *Anda* maksudkan

(31) *Siapa yang *Anda* maksudkan (misalnya, untuk Presiden)

(Tanda astrisk * berarti 'dilarang' ditujukan kepada seorang presiden. Hal ini berbeda dengan "you" dalam bahasa Inggris).

Sapaan dalam bahasa Jawa

Dalam bahasa Jawa dikenal dan juga digunakan sapaan *Bapak*, baik *ngoko* maupun *kromo*, seperti contoh di bawah ini:

(32) *Bapak* tindak pundi (*Ngoko*)

(33) *Bapak* arep nyang ndi (*Kromo*)

(Artinya: 'Bapak akan pergi ke mana?')

Dalam bahasa Jawa, selama kata *bapak* tidak memiliki imbangan *kromo*, maka sapaan *bapak* dapat digunakan dalam situasi resmi, seperti contoh (34). Akan tetapi, dalam bahasa Jawa sendiri dikenal bentuk *kromo*, *njenengan* atau *sampeyan*, seperti contoh (35).

(34) *Bapak* Sri Sultan Hamengku Buwono X

'Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono X'

(35) *Njenengan* sampun dhahar?

'Anda sudah makan?'

Sapaan dalam bahasa Bali

Dalam bahasa Bali dikenal sapaan seperti *ragane* atau *jerone* untuk menyapa lawan bicara. Sufiks *-ne* pada kedua kata itu bermakna 'definit' (tertentu). Perhatikan pemakaiannya di bawah ini:

(36) *Ragane* ane ngelahcarik-e ento? (*Lumrah*)

(37) *Jerone* sane nuwenang carik-e nika? (*Alus*)

(Artinya: 'Andakah yangpunya sawah itu?')

Dalam bahasa Bali penggunaan sapaan *Bapak* dirasakan kurang tepat oleh penutur untuk mengganti kedua sapaan tersebut karena asal usul lawan bicara harus dipertimbangkan.

Istilah Menyebut

Istilah menyebut digunakan untuk menunjuk orang ketiga atau orang yang dibicarakan.

Sebutan dalam Bahasa Indonesia

Istilah menyebut dalam bahasa Indonesia, yakni *dia*, biasanya digunakan untuk menunjuk orang ketiga yang seusia. Penggunaan *dia* untuk menyebut orang yang lebih tua atau yang dihormati tentulah tidak pantas dalam budaya Indonesia. Misalnya, seorang Presiden, Pemimpin, Sultan, Kyai, Haji/Hajiah, Ustad, ataupun Pendeta/Pastur. Untuk penyebutan jabatan, pemimin, gelar-gelar status yang dimiliki seseorang digunakan kata *beliau*. Dalam debat yang berlangsung, Joko Widodo sebagai presiden, dikacaukan dengan Joko Widodo sebagai individu/tidak dengan jabatan presiden.

Sebutan dalam Bahasa Jawa

Dalam bahasa Jawa dikenal istilah “menyebut”, yakni *bapak* (laki-laki) dan *ibu* (perempuan), yang ditujukan kepada orang yang lebih tinggi status sosialnya atau orang yang pantas dihormati, seperti priyayi, pemimpin agama, guru. Berikut adalah contoh penggunaan sebutan itu:

- (38) Mbak Heni sering telpon *Bapak*
‘Kakak Heni sering meelepoko Bapak’
- (39) Radha kapentak, sing nunggoni *Bapak* karo *Ibu*
‘Agak enak, yang menunggu Bapak dan Ibu’

Sebutan dalam Bahasa Bali

Dalam bahasa Bali dikenal pula istilah “menyebut”, yakni *iya* (*Lumrah*), *ipun*, dan *ida* (*Alus*). Berikut adalah contoh penggunaan sebutan itu:

- (40) *Iya* ngelah carik liu (*Lumrah*)
- (41) *Ipun* meduwe carik akeh (*Alus*)
- (42) *Ida* meduwe carik akeh (*Alus*)
(Artinya: ‘Ia memiliki banyak sawah’)

Etika bahasa daerah Jawa dan Bali tersebut dapat dijadikan contoh oleh pemakai bahasa Indonesia. Bagaimana penggunaannya bergantung pada konteksnya. Bentuk sapaan bahasa Indonesia memang tidak serumit dalam kedua bahasa daerah tersebut, namun perilaku berbahasa penuturnya dapat dijadikan model beretika dalam berbahasa Indonesia.

PENUTUP

Debat publik yang berlangsung menjelang Pilpres 2019 sungguh menyita perhatian masyarakat. Motivasi politik dan golongan kental memengaruhi debat yang berujung pada polarisasi masyarakat akar rumput. Penggunaan bahasa yang bermakna menghasut bertujuan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019 karena pelibat berharap dengan cara seperti itu ia dapat memenangkan status/posisi yang lebih dari lawan.

Pembaca/penonton yang bertindak sebagai “komunitas ienterpretif” mampu memberi penilaian bahwa isi debat publik seperti itu dapat memecah belah persatuan bangsa. Dampak negatifnya bagi generasi muda sudah terlihat bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus telah teracuni oleh perilaku berbahasa generasi tua mereka.

Strategi yang dapat dipakai mengubah perilaku berbahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu tidak lain adalah individu secara keseluruhan harus bercermin pada etika bahasa, seperti yang dipraktikkan oleh penutur bahasa Jawa dan Bali. Etika bahasa pada kedua bahasa itu sudah menjadi rujukan, diakui oleh umum, bagaimana penuturnya menghargai orang lain seperti menghargai

diri sendiri. Meskipun bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang “demokratis”, penutur harus tetap menggunakan pilihan kata yang santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. B. (2018, 18 April). Langkah maju Jokowi. *Kompas*, Harian Nasional.
- Duranti, A. (1997). *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foley, W.A. (1997). *Anthropological Linguistics: An introduction*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Foucault, M. (2016). *Arkeologi Pengetahuan*. (Inyik Ridwan Musir, penerjemah dan Edi AH Iyubinu, editor). Yogyakarta: Pelangi. (Karya asli diterbitkan pada 1969).
- Foucault, M. (2017). *Wacana Kuasa/Pengetahuan* (Yudi Santoso, penerjemah dan Toni Setiawan, Sufianto dkk., penyunting). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus. (Karya asli diterbitkan pada 1972-1977!).
- Geertz, C. (1974). Linguistic etiquette. Dalam J. Fishman, ed., *Reading in the Sociology and Language*. Den Haag: Mouton (hlm. 167—180).
- Gonda, J. (1975). The Javanese vocabulary of courtesy”. Dalam E.J. Brill, ed., *J. Gonda Selected Studies*. Volume V. Leiden: E.J. Brill (hlm. 255—298).
- Halliday, M.A.K. dan Hasan, R. (1985). *Language, Context, and Text: Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Victoria: Deakin University Press.
- Harris, M. (1991). *Cultural Anthropology*. Edisi Ketiga. New York: Harfer Collins Publisher.
- Kersten, J. (1984). *Bahasa Bali: Tata bahasa dan kamus lumrah*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Kuper, A. dan Kuper, J. (2008). *Ensiklopedi Ilmu-ilmu sosial*. Edisi II. (Haris Munandar, penerjemah). Jakarta: PT RajaGrafindo. (Karya asli diterbitkan pada 1996).
- Laksana, I Ketut Darma. (2009). *Tabu Bahasa: Salah satu cara memahami kebudayaan Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Lubis, A.Y. (2014). *Postmodernisme: Teori dan metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Poedjosoedarmo, G. R. (1986). *Role structure in Javanese*. Seri NUSA, Vol. 24. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Salzmann, Z. (1998). *Language, Culture, and Society: An ntroduction to linguistic anthropology*. Edisi Kedua. Colorado: Westview Press.
- de Saussure, F. (1988). *Pengantar Linguistik Umum*. (R.S. Hidayat, penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Karya asli diterbitkan pada 1916).
- Sim, S. dan van Loon, B. (2008). *Mengenl Teori Kritis*. (Tim Resist, penerjemah.). Yogyakarta: Resist Book. (Karya asli diterbitkan tanpa angka tahun!).
- Steinhauer, H. (2003). “Perkembangan bahasa Indonesia dari aspek teori linguistik”. Makalah disajikan dalam *Kongres Bahasa Indonesia VIII*, Oktober, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Tinggaen, I N. (1995). *Sor singgih Basa Bali*. Singaraja: CV Rhika Dewata.
- Wardhaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blakwell.
- Zoetmulder, P.J. (2006). *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno selayang pandang*. (Dick Hartoko, penerjemah). Jakarta: Jambatan. (Karya asli diterbitkan pada 1976).

